



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

SELASA : 12 JANUARI 2021
EDISI : 00226280/GBP/II/2021

KLIPING

Berita Pertanian



SELASA, 12 JANUARI 2021

- Membangun Ketahanan Pangan (ID) 22-23

00000000000000000000 000 0000000000000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 13 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

| SENTIMEN KOMODITAS |

CPO Diwarnai Sinyal Pelemahan Permintaan

Bisnis, JAKARTA — Harga minyak sawit berpotensi melemah, tersengat penurunan permintaan.

Berdasarkan data *Bloomberg*, hingga pukul 15.41 WIB, harga minyak sawit (*crude palm oil*/CPO) berjangka di bursa Malaysia berada di posisi 3.970 ringgit per ton, terkoreksi 0,69%, padahal harga CPO sempat menyentuh level tertingginya sejak 2008 dan menyentuh 4.000 ringgit per ton.

Kendati demikian, sepanjang tahun berjalan 2021, harga masih mencatatkan penguatan sebesar 2,85%. 81.13

Manajer Penjualan Institutional Phillip Futures Kuala Lumpur, Marcello Cultrera mengatakan bahwa katalis negatif harga CPO berasal dari Malaysia, sebagai negara eksportir dan produsen CPO terbesar kedua di dunia.

Malaysia mencatatkan pengiriman ekspor CPO untuk periode 10 hari pertama Januari 2021, lebih rendah 35% daripada bulan sebelumnya. Data tersebut melemahkan sinyal *bullish* permintaan yang selama ini membuat investor optimistis terhadap harga CPO.

"Penurunan permintaan pada periode 1-10 Januari 2021 itu menekan harga," katanya seperti dikutip dari *Bloomberg*, Senin (11/1).

Selain itu, dia menjelaskan bahwa investor juga dibebani sentimen penurunan stok CPO yang lebih rendah daripada ekspektasi pasar pada Desember 2020. Hal itu makin memperkuat asumsi bahwa permintaan dalam tekanan pada awal tahun ini.

Adapun, Dewan Minyak Sawit Malaysia mencatat stok CPO Negeri Jiran itu untuk periode Desember 2020 sebe-

sar 1,26 juta ton, lebih tinggi daripada ekspektasi perseroan yang memproyeksi stok akan anjlok ke level 1,18 juta ton.

Di sisi lain, sejumlah analisis percaya harga CPO bertahan mendekati level tertingginya dalam 10 tahun terakhir di tengah prospek pasokan yang ketat dalam waktu dekat.

Founder Palm Oil Analytics Singapura Sathia Varqa memproyeksi produksi CPO di Semenanjung Malaysia, wilayah perkebunan CPO utama Malaysia, kemungkinan menyusut lebih dari 5% pada kuartal I/2021 akibat curah hujan yang tinggi.

Sementara itu, Ketua LMC International James Fry mengatakan, dalam jangka panjang, pasokan CPO akan meningkat lebih dari 6 juta ton pada 2021, terutama dari produsen CPO terbesar dunia, Indonesia. (Finna Ulla Ulfah)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 16 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

1 Juta Ha Menuju Swasembada Kedelai

Dari kebutuhan nasional sebanyak 2,8 juta ton per tahun, produksi kedelai dalam negeri baru mampu berkisar 300 ribu-400 ribu ton per tahun.

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mencari lahan yang luas untuk dijadikan pusat lokasi pengembangan kedelai. Presiden ingin persoalan yang terkait dengan tahu-tempe tak kembali terulang.

Saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Presiden menyebut kenaikan harga kedelai adalah persoalan yang terus berulang setiap tahun. **M-10**

Karena itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan ialah dengan

mengembangkan kawasan khusus produksi supaya bisa swasembada kedelai.

"Kita harus bangun di lahan yang sangat luas. Jangan hanya 10 hektare atau 100 hektare, tapi 500 ribu, 1 juta hektare. Cari," tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kebutuhan kedelai di Tanah Air mencapai 2,8 juta ton per tahun. Adapun produksi dalam negeri hanya mampu berkisar 300 ribu-400 ribu ton per tahun.

Artinya, ada 2,5 juta ton yang harus didatangkan dari luar negeri.

Jokowi mengatakan kedelai sedianya bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Namun masalahnya, tidak banyak petani yang mau menanam.

Hal itu terjadi karena proses penanaman dilakukan dengan skala kecil sehingga tidak memiliki nilai ekonomi yang besar.

"Karena skalanya kecil, harga pokok produksinya jadi tinggi dan harga jualnya ikut tinggi. Akhirnya tidak bisa bersaing dengan kedelai impor yang lebih murah," ujar Jokowi.

Harga tertinggi!

Di kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut harga kedelai yang mencapai US\$13 per bushel (gantang) di pasar global menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir.

"Sekarang ini harga kedelai itu US\$13 per bushel, per rumpunnya. Ini adalah harga tertinggi dalam enam tahun terakhir," kata Lutfi dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.

Bushel adalah unit pengukuran yang berlaku di AS yang digunakan untuk menakar volume kering suatu komoditas perdagangan, khususnya komoditas pertanian seperti kedelai. Ukuran 1 bushel sama dengan 27,2 kilogram.

Lutfi menyampaikan, tingginya permintaan kedelai di pasar global, serta produksi yang menurun, menjadi penyebab utama melambungnya harga kedelai.

Saat ini, harga kedelai yang dibeli perajin tahu-tempe dari para importir melonjak. Berdasarkan data Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai melonjak hingga Rp9.300-9.800 per kg, dari kisaran harga normal Rp6.000-Rp7.000 per kg.

Lutfi menjelaskan, di Argentina, salah satu negara produsen kedelai, selain ada gangguan cuaca basah La Nina, juga terjadi aksi mogok pekerja di sektor distribusi dan pengapalan.

Selain itu, Tiongkok yang menjadi negara importir terbesar kedelai meningkatkan jumlah permintaannya, dari 15 juta ton menjadi 28 juta ton, untuk pakan ternak babi. Hal itu ikut melambungkan harga secara global.

Meski demikian, Kemendag memastikan stok kedelai di Indonesia tercukupi dalam tiga sampai empat bulan ke depan. Hanya saja terjadi kenaikan harga. (Try/Ant/E-2)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 12 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☒ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Kemtan Akan Memperluas Lahan Pertanian Lokal

JAKARTA. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berjanji pemerintah akan memperluas lahan pertanian di Tanah Air. Cara ini sebagai upaya meningkatkan produksi bahan pangan, berbarengan dengan upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia.

Syahrul berharap Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor pangan. "Perluasan area tanam di sejumlah daerah terus dilakukan sesuai arahan Presiden," ujar Syahrul saat Rapat Kerja Nasional di Istana Negara, Senin (11/1).

Kementerian Pertanian mengklaim nilai dan volume impor bahan pangan turun 10% di tahun 2020. Penurunan impor diyakini sebagai hasil program jangka panjang pembangunan sumber pangan di tiap-tiap daerah.

Nah, dalam program tersebut setiap daerah harus mengembangkan tanaman pangan khas. Selain beras, tanaman lain yang bisa dikembangkan seperti jagung dan sorgum. "Ini diversifikasi pangan, dan setiap provinsi harus ada pangan lokal," terang Syahrul.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat mengkritik ketergantungan impor pangan Indonesia. Presiden Jokowi menginginkan pengembangan komoditas pertanian pada lahan berskala ekonomi sehingga harga hasil produksi dapat bersaing dengan pangan impor.

"Kalau harga tidak kompetitif menjadi sulit untuk bersaing, sehingga harus dibangun di sebuah lahan yang luas bukan lahan kecil," kata Presiden Joko Widodo.

Abdul Basith Bardan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Tani Skala Besar Solusi Pangan

Kebijakan subsidi pupuk dinilai salah karena tidak memberikan hasil baik bagi negara.

ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com

UNTUK mencapai swasembada pangan sekaligus memutuskan impor, Indonesia perlu mengembangkan pertanian berskala besar.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan kemampuan produksi pangan nasional.

"Sektor pertanian masih konvensional tanpa terobosan. Kita tidak bisa melakukan hal-hal konvensional. Kita harus membangun kawasan berskala ekonomi, tidak kecil-kecil lagi," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Tahun ini mulai digarap lumbung pangan nasional di Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah sehingga bisa kita evaluasi apa problemnya, apa masalahnya di lapangan, dan kurang apa teknologinya," lanjut Jokowi (lihat grafik).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap

mengurangi impor dengan meningkatkan produksi pangan nasional.

Menurut Syahrul, kini jajaran Kementan memiliki kebijakan jangka panjang untuk menekan impor.

"Saya mau 200 hari dari sekarang kita sudah bisa kasih jawaban kepada Presiden," ujar Mentan Syahrul.

Pada 2020 impor pangan berkurang 10% karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangun sumber pangan di setiap daerah.

"Perluasan area tanam di sejumlah daerah terus dilakukan sesuai arahan Presiden," lanjut Syahrul.

Adapun arah kebijakan pembangunan pertanian pada 2021 ialah mengoptimalkan sumber daya dengan kemandirian nasional dan lokal serta memanfaatkan teknologi atau modernisasi.

Selain itu, pertanian fokus pada mekanisasi korporasi dari hulu hingga hilir. Lalu, diversifikasi pangan, yakni setiap provinsi harus memiliki pangan lokal tidak hanya beras, tetapi juga pisang, sagu,

sorgun, dan lainnya.

"Untuk korporasi sementara ini ada enam provinsi. Perluasan areal tanam ini akan dilakukan dengan ekspansi ke beberapa daerah," ungkap Mentan.

Subsidi pupuk

Pada kesempatan pembukaan Rakernas Kementan, Jokowi menyinggung pula kebijakan subsidi pupuk yang dinilai salah karena tidak memberikan hasil baik bagi negara.

"Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran Rp33 triliun untuk subsidi pupuk. Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun. Apa pengembaliannya ke negara? Apakah produksi melompat naik? Tolong dievaluasi," ungkap Jokowi.

Presiden meminta Kementan tidak lagi terjebak mengurus persoalan lama yang tidak memberi keuntungan bagi negara.

"Sehingga harga bisa bersaing dengan negara lain. Itu baru benar. Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk kemudian tidak ada lompatan di sisi produksi, itu ada yang salah. Ada yang tidak benar di

situ," tandas Presiden.

Pernyataan Presiden atas subsidi pupuk sebesar Rp33 triliun per tahun yang tidak berdampak pada produktivitas pertanian disoroti relawan Jokowi.

"Bahkan direksi PT Pupuk Indonesia pernah kena OTT oleh KPK. Begitu juga di banyak daerah, ada pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk terjatuh hukum," kata Ketua Relawan Jokowi Mania, Imanuel Ebenezer, kemarin.

"Harga pupuk rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Jangan-jangan pupuk untuk petani yang tersedia hanya 60%-70%. Sisanya dijual ke luar negeri," tandas Imanuel yang akrab disapa Noel. (Iam/Zuq/X-3)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 12 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Program Ketahanan Pangan 2021

Diarahkan untuk peningkatan produksi pangan serta dukungan pemulihan ekonomi.

Anggaran Ketahanan Pangan 2016-2021

(triliun rupiah)

2017	100,3	-9,1%
2018	89,5	-10,8%
2019	85,1	-4,9%
2020	80,0	-6,0%
2021	99,0	23,7%

Kebijakan:

- Mendorong produksi komoditas pangan.
- Revitalisasi sistem pangan nasional.
- Pengembangan *food estate* di Kalteng, Sumsel, dan Papua.



Program Food Estate

Sumatra Utara

- Luas lahan: 60 ribu hektare
- Lahan untuk *food estate*: 30 ribu hektare

Wilayah:

- Kabupaten Humbang Hasundutan
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kabupaten Pakpak Barat

Komoditas pangan:

- Kentang
- Bawang merah
- Bawang putih

Sumber: Kementerian Pertanian/Kementerian Keuangan/Riset MI-NRC

Kalimantan Tengah

- Luas lahan: 164,6 ribu ha
- Intensifikasi: 79,1 ribu ha
- Ekstensifikasi: 85,5 ribu ha

Wilayah:

- Kabupaten Kapuas
- Kabupaten Pulang Pisau

Komoditas pangan:

- Padi
- Singkong



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 12 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Yajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

PENGEMBANGAN FOOD ESTATE

NEGARA MINTA IMBAL BALIK

Dua proyek pengembangan lumbung pangan atau *food estate* yang sudah dimulai tahun lalu ditargetkan bisa selesai pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun lalu membawa konsekuensi pada melambungnya realisasi pencairan restitusi atau

Nindya Aldila & Rayful Mudassir
redaksi@bisnis.com

Dua kali Presiden Joko Widodo dalam sepekan terakhir mengingatkan agar program *food estate* atau lumbung pangan yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dipercepat.

Pertama disampaikan Jokowi pada saat membuka rapat terbatas terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/1).

Saat itu, Jokowi meminta agar Gubernur yang di provinsi ada proyek *food estate* mendukung penuh pembangunan serta mempercepat perizinan.

Kedua kalinya disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Nega-

ra, Senin (11/1).

Jokowi meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dapat menyelesaikan persiapan *food estate* atau lumbung pangan terpadu di dua provinsi pada tahun ini.

Food estate rencananya berada di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau Kalimantan Tengah yang mengawali fokus pada tanaman padi.

Selanjutnya berada di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatra Utara yang dikhususkan untuk komoditas hortikultura.

"Saya dorong *food estate* ini harus segera diselesaikan paling tidak tahun ini yang di Sumatra Utara dan di Kalimantan Tengah diselesaikan," kata Jokowi.

Dua lokasi tersebut akan menjadi contoh bagi daerah lain sehingga harus segera diselesaikan. Berbagai masalah baik di lapangan maupun teknologi harus dicarikan solusi.

Jokowi menegaskan bahwa keberadaan *food estate* harus punya pengaruh terhadap aktivitas ekspor-impor komoditas

pertanian yang kerap harganya melonjak akibat terkendala pasokan.

Misalnya, kedelai dalam negeri yang tidak bersaing dengan produk impor hingga menekan produsen tahu dan tempe yang dipengaruhi arus distribusi produk pangan yang terhambat akibat pandemi Covid-19.

Seperti diberitakan *Bisnis*, produsen tahu dan tempe mogok sepanjang 1-3 Januari 2021 lantaran harga kedelai yang terus melambung. Hal itu dipicu oleh harga kedelai yang menembus Rp470.000 per karung dari sebelumnya Rp370.000 per karung seberat

50 kilo-gram.

Kondisi seperti itu akan memengaruhi komoditas yang masih banyak mengandalkan impor. Untuk itu, diperlukan pengelolaan pangan yang serius untuk mengatasi komoditas impor.

Jokowi secara khusus menyebutkan sejumlah komoditas seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih menjadi perhatian.

"Problem dari dulu sampai sekarang, kedelai yang bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Kenapa petani kita tidak

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 12 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

mau tanam, karena harganya kalah dengan yang kedelai impor. Kalau disuruh jual sama dengan harga impor, harga pokok produksinya tidak menutupi,” ungkapnya.

Dia meminta para menteri yang terlibat soal pangan dapat mendorong produksi kedelai yang jauh lebih besar. Menurutnya, ketersediaan lahan bukan lagi jadi masalah.

Tidak hanya dengan cara konvensional, peningkatan produksi harus dibarengi dengan pengembangan teknologi pertanian yang memadai.

Oleh karena itu, *food estate* harus menjadi solusi dalam rantai distribusi komoditas.

“Percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, tidak berpengaruh apa-apa ke produk-produk impor tadi,” ungkap Presiden.

Di sisi lain, Jokowi menegaskan bakal terus mengikuti perkembangan program *food estate*.

Jika lumbung pangan di dua provinsi sukses dibangun, selanjutnya provinsi lain akan didorong mengembangkan hal serupa.

“Kita berikan dana dari APBN, tapi betul-betul ada *return* yang diberikan ke negara,” tambah Presiden.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan salah satu fokus kerja Kementerian adalah pembangunan *food estate* dan korporasi pertanian yang sementara ini telah berjalan di enam provinsi.

Selain itu, Kementan juga akan melanjutkan program

lumbung pangan yang akan dibangun di desa, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional.

Rakernas ini merupakan pertemuan yang akan membahas program kerja Kementerian pertanian Tahun 2021 yang bertemakan memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.

“Program utama dalam mewujudkan ketahanan pangan, pertama meningkatkan produktivitas, yang insyaallah akan lebih baik pada 2021,” kata Mentan.

PUPUK SUBSIDI

Dalam perkembangan lain, Jokowi juga meminta jajaran menteri agar segera menangani rendahnya produksi sejumlah komoditas seiring dengan tingginya pengeluaran untuk subsidi pupuk.

Presiden mengatakan pemerintah mengeluarkan dana sekitar Rp33 triliun setiap tahunnya untuk subsidi pupuk.

Namun demikian, dengan anggaran sebesar itu, sejumlah komoditas penting seperti gula, bawang putih, dan kedelai di Tanah Air masih harus impor karena produksi di dalam negeri tidak bersaing.

“Kalau setiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan dari sisi produksi. Ada yang salah, ada yang tidak

benar di situ,” katanya.

Perlu diketahui, Permentan 49/2020 Kementan menyebutkan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi pada 2021 menjadi 9,04 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan total alokasi subsidi pupuk pada 2020 sebesar 8,9 juta ton.

Di depan para menteri yang hadir, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Presiden

Jokowi mempertanyakan minimnya hasil yang tidak sebanding

dengan subsidi Rp33 triliun.

“Rp33 triliun untuk subsidi pupuk, *return*-nya apa?

Apakah produksi melompat naik.

Saya tanya kembalinya apa?

[Subsidi pupuk] kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun. Angka itu besar sekali. Jadi ini tolong dievaluasi. Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali minta ini,” tegas Jokowi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 49/2020, pupuk bersubsidi

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☒ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 12 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Mentan Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan jajarannya untuk merapikan gerak lini di hilir subsidi pupuk.

"Tahun 2021 ini kita benar-benar awasi terutama lini tiga dan empat atau dari distributor

JAGA KETAHANAN PANGAN

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah terus berupaya menyelesaikan pengembangan kawasan *food estate* hortikultura berbasis korporasi. Dua lokasi pengembangan kawasan tersebut berada di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

Food Estate Kabupaten Pulang Pisau :

- Lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng.
- Dari 165.000 ha lahan itu, seluas 85.500 ha merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi.
- Seluas 79.500 ha sisanya berupa semak belukar.
- Dari 85.500 ha lahan fungsional, sekitar 28.300 ha dinyatakan memiliki kondisi irigasi baik, sedangkan 57.200 ha lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan total kebutuhan anggaran Rp1,05 triliun.

Sumber : pertanian.go.id, kemhan.go.id, pemberitaan, diolah

Food Estate Kabupaten Humbang Hasundutan :

- Total luas areal yang dipersiapkan 1.000 ha.
- Pengembangan kawasan *food estate* dibangun model industri hulu-hilir termasuk pascapanen.
- Peningkatan luas tanam dan produksi komoditas bawang merah, bawang putih dan kentang.
- Pihak Swasta yang telah menanamkan modal di antaranya PT Indofood, PT Calbee Wings, PT Champ, PT Semangat Tani Maju Bersama, PT Agra Garlica dan PT Agri Indo Sejahtera, dan PT Karya Tani Semesta.

Kementerian yang Terlibat :

- Kementerian Pertanian sebagai pengarah utama *food estate*.
- Kementerian PUPR sebagai eksekutor penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung seperti irigasi.
- Kementerian BUMN sebagai pelaksana melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan *off-taker* di tangan Perum Bulog (Persero).
- Kementerian Pertanian sebagai koordinator pengembangan *food estate* dan menyiapkan sarana produksi.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengawal aspek lingkungan hidup dan kehutanan diintegrasikan dengan pemulihan gambut.

subsidi.

Oleh karena itu, Hatta meminta petani agar memas-tikan sudah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut izinnya," ujarnya. ■

ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan di sini, ketersediaan pupuk bersubsidi terpenuhi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menjelaskan bahwa berdasarkan e-RDKK yang diatur kelompok tani, penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan dengan lahan paling luas 2 ha.

Direktur Pupuk dan Pesti-sida Kementerian Pertanian Muhammad Hatta menyebut

penyaluran melalui sistem e-RDKK dilakukan supaya penerima subsidi betul-betul tepat sasaran.

Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima pupuk

Bisnis/Adi Pramono

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Mendag Prediksi Harga Kedelai Naik Hingga Mei 2021

■ IIT SEPTYANINGSIH,
DESSY SUCIATI SAPUTRI

JAKARTA — Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan, harga kedelai akan terus menguat hingga akhir Mei 2021. Dia berharap, harga komoditas tersebut mulai membaik pada Juni 2021. Kendati terjadi kenaikan harga, Lutfi memastikan stok kedelai di Tanah Air akan tetap tersedia selama tiga sampai empat bulan ke depan.

"Memang hasil dari *crop* pada 2021 dinyatakan baik. Brasil akan kembali berproduksi, mungkin lebih baik dari tahun sebelumnya," ujar Lutfi dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (11/1).

Lutfi mengatakan, lonjakan harga kedelai terjadi akibat kombinasi gangguan produksi dan peningkatan permintaan dunia. Gangguan cuaca terjadi di negara Amerika Latin terutama Brasil dan Argentina yang merupakan produsen kedelai.

Di sisi lain, permintaan kedelai melonjak drastis untuk kebutuhan pakan ternak di Cina. Lutfi menjelaskan, pada 2019 hingga 2020, dunia peternakan di Cina menghadapi wabah flu babi. Sehingga, seluruh ternak babi harus dimusnahkan. Saat ini, peternak babi di Cina mulai kembali menggeliat sehingga memicu permintaan kedelai naik dua kali lipat sebagai sumber pakan.

"Permintaan kedelai Cina naik dari 15 juta ton menjadi 28 juta ton," ujar Lutfi. **R 10**

Peristiwa tersebut turut berdampak kepada Indonesia. Hal ini terutama karena 90 persen pasokan kedelai berasal dari impor.

Kemendag menegaskan, akan menjadi penengah antara pengrajin tahu tempe dan pasar. Lutfi akan membantu dengan memberikan

Kalau suruh menjual dengan harga yang impor, ini harga pokok produksinya tidak *nutup*. Sehingga, harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa melawan harga yang impor.

perkiraan harga wajar tahu dan tempe secara bulanan. Saat ini, menurut dia, harga wajar tahu dan tempe adalah Rp 15 ribu per kilogram.

"Di kemudian hari ketika harga akan naik, kami akan umumkan ke pasar berapa harga wajar untuk tahu dan tempe," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah komoditas pangan yang masih diimpor dari negara lain, seperti kedelai, jagung, gula, bawang putih, dan beras. Menurut Jokowi, masalah im-

por pangan harus segera diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, ia meminta jajarannya serius membenahi pengelolaan komoditas pertanian dan pangan.

"Barang-barang ini harus diselesaikan. Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas yang lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tanaman kedelai dapat tumbuh baik di Indonesia. Namun, para petani enggan menanam kedelai karena harganya yang kalah saing dengan kedelai impor. Begitu juga dengan komoditas bawang putih. Saat ini, tak banyak petani yang mau menanam bawang putih karena harganya juga kalah bersaing dengan bawang putih impor.

Karena itu, Jokowi pun meminta agar lahan pertanian lebih diperluas sehingga produksinya semakin besar dan dapat bersaing dengan komoditas pangan impor.

"Kalau suruh menjual dengan harga yang impor, ini harga pokok produksinya tidak *nutup*. Sehingga, harus dalam jumlah yang besar agar harganya bisa melawan harga yang impor," jelasnya.

Presiden pun menginstruksikan para menterinya untuk mengawasi pembangunan lumbung pangan di Indonesia. Jika berhasil, program ini juga akan dilaksanakan di sejumlah provinsi lainnya.

■ ed: ahmad fikri noor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

INDUSTRI PANGAN

Presiden: Perbaiki Tata Kelola Pertanian

JAKARTA, KOMPAS — Pembatasan mobilitas manusia dan distribusi barang antarnegara selama pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis pangan. Oleh karena itu, tata kelola pertanian di Tanah Air harus segera diperbaiki agar bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021), mengingatkan jajarannya, sektor pertanian menempati posisi yang makin sentral selama pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas membuat distribusi bahan pangan antarnegara terganggu. Kondisi itu, seperti telah diingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), berpotensi menyebabkan krisis pangan.

Presiden Jokowi mengingatkan tata kelola sektor pertanian harus segera diperbaiki. "Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta jiwa lebih. Oleh sebab itu, pengelolaan pangan harus betul-betul kita seriusi, pembangunan pertanian betul-betul harus kita seriusi secara detail, terutama yang berkaitan dengan komoditas pertanian impor," kata Presiden.

Pemenuhan kebutuhan sejumlah bahan pangan yang selama ini masih jadi persoalan, kata Presiden, harus segera diselesaikan. Terutama bahan pangan yang selama ini masih diimpor, seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih.

Di hadapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta menteri lain yang hadir, Presiden meminta agar jajarannya segera merumuskan desain pembangunan pertanian yang bisa menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam negeri.

Presiden menegaskan, saat ini bukan saatnya lagi melakukan hal-hal yang konvensional dan monoton, seperti mengembangkan kawasan pertanian dalam skala kecil. Hal yang perlu dilakukan adalah membangun kawasan industri pertanian, seperti *food estate* yang kini tengah dipersiapkan pemerintah di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah yang ditargetkan selesai tahun ini.

Terkait hal itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan kesiapan untuk

meningkatkan produksi pangan nasional. Kementerian Pertanian sudah menyiapkan sejumlah kebijakan jangka panjang untuk mengurangi impor. "Saya sudah perintahkan ke seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk menjawab tantangan ini. Saya mau 200 hari dari sekarang sudah bisa kasih jawaban ke Presiden," ujarnya.

Sepanjang tahun 2020, kata Syahrul, impor bahan pangan berkurang hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan itu karena pemerintah memiliki program jangka panjang yang fokus membangun sumber pangan di tiap-tiap daerah. Selain itu, pemerintah berupaya memperluas area tanam di sejumlah daerah. Harapannya, ketergantungan terhadap bahan pangan impor perlahan bisa dikurangi, bahkan dihilangkan. (NTA) 4 - 10

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Anggaran Ketahanan Pangan Rp 104 Triliun

JAKARTA—Anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2021 meningkat 30% menjadi Rp 104 triliun. Anggaran ketahanan pangan dari 2016-2020 memiliki tren menurun, namun tahun ini dipastikan meningkat, apabila pada 2020 hanya mencapai Rp 80 triliun maka tahun ini menjadi Rp 104 triliun. Penyerapan anggaran ketahanan pangan harus terus naik dan benar-benar dipakai sehingga ketahanan pangan terwujud. **D-7**

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, dalam menyusun anggaran ketahanan pangan, terdapat empat hal yang harus dilihat, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan perlunya komunikasi lintas sektor antar-kementerian. Pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional dan tenaga kerja yang diserap juga besar. "Di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini maka harus dilakukan reformasi yang serius, isu apa yang penting dalam pertanian

dan ketahanan pangan, ini yang harus diperhatikan. Ketahanan pangan sangat tergantung pada lintas sektor tidak bisa hanya Kementerian Pertanian sendiri yang melakukannya," ujar Suahasil Nazara dalam Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Jakarta, Senin (11/1).

Isu terkait pertanian, pangan, dan ketahanan pangan yang harus diperhatikan adalah, *pertama*, dari sisi permintaan akan terus meningkat selain itu sifatnya ada siklusnya mendekati hari besar keagamaan dan hari besar nasional maka permintaan terhadap pangan pasti tinggi. *Kedua*, soal pasokan harus terus dipantau, biasanya tergantung distribusi dan penanganan pascapanen dan pasokan pangan tidak boleh defisit. *Ketiga*, struktur pasar yang lebih efisien, perlu keterpaduan antarregulasi dan ketersediaan sumber daya manusia.

Pada tahun 2020 yang baru saja dilewati merupakan tahun yang cukup sulit dan menantang kare-

na pandemi Covid-19. Di sinilah tugas Kementerian Keuangan untuk memastikan keuangan negara aman dan stabil sekaligus bisa memberikan bantuan yang maksimal bagi perekonomian. Pada 2020 juga dapat dilihat kebijakan APBN yang sangat luar biasa, di antaranya *refocusing* dan realokasi APBN. "Anggaran kesehatan, perlindungan sosial, pemerintah daerah, dan ketahanan pangan menjadi prioritas," jelas dia.

Selama pandemi, banyak kegiatan dilakukan di rumah dan terjadi pembatasan sosial berskala besar sehingga berdampak pada penerimaan negara. Meskipun penerimaan negara turun tetapi belanja negara harus bisa mendukung kondisi perekonomian Indonesia. Belanja pemerintah pusat tumbuh 20% sepanjang 2020 dibandingkan 2019, artinya meski kegiatan ekonomi menurun tetapi belanjanya meningkat. Belanja bantuan sosial meningkat 80% untuk melindungi konsumsi masyarakat terutama untuk masyarakat rentan. **(dho)**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Jaga Harga Tahu dan Tempe

JAKARTA, KOMPAS — Harga kedelai dunia diperkirakan terus menguat sampai akhir Mei 2021 seiring dengan permintaan yang meningkat dan pasokan yang ketat dari negara produsen. Pemerintah Indonesia menyatakan akan menjadi pene-nang antara importir, perajin, dan pasar untuk menjaga agar kenaikan harga tahu dan tempe tetap di batas yang wajar.

Per 8 Januari 2021, harga kedelai ada di level 13,75 dollar AS per gantang (27,2 kg), me-nkuat dibandingkan Janua-ri-Agustus 2020 di kisaran 9 dollar AS per gantang. Di dalam negeri, harga kedelai impor me-lonjak dari kisaran Rp 6.000-Rp 7.000 per kilogram (kg) jadi Rp 8.500-Rp 9.500 per kg.

Menteri Perdagangan Mu-hammad Lutfi, Senin (11/1/2021), memastikan pasok-an kacang kedelai untuk ke-butuhan dalam negeri selama 2-3 bulan ke depan mencukupi. Namun, kenaikan harga ta-hu-tempe mau tidak mau ter-jadi. Gangguan cuaca, produksi, dan logistik di negara produsen, seperti Brasil dan Argentina, serta tingginya permintaan ke-delai dari China, membuat har-ganya terus menguat.

Lutfi mengatakan, untuk se-mantara ini, harga keseimbang-an tahu dan tempe sudah ter-bentuk di pasar. Dengan harga kedelai di tingkat importir (*land-ed cost*) sekitar Rp 8.500 per kg, harga tahu dan tempe di pasaran naik dari Rp 13.000 per kg jadi Rp 15.000 per kg.

"Ini adalah keniscayaan yang harus kita hadapi. Setiap akhir bulan, pemerintah akan men-bantu menetapkan estimasi harga yang wajar untuk tahu dan tempe. Kami akan jadi pe-nengah antara importir, pro-dusen tahu-tempe, dan pasar," kata Lutfi dalam konferensi

Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada impor dan fluktuasi harga kedelai global.

Aip Syarifuddin

pers Trade Outlook 2021 secara daring di Jakarta.

Namun, penetapan harga yang wajar oleh pemerintah ini hanya berlaku sementara. Pe-merintah hanya akan jadi pene-nang selama harga kedelai di tingkat importir di atas Rp 8.000 per kg. Ketika harga kem-bali di bawah Rp 8.000 per kg, pemerintah akan mengembali-kan penetapan harga pada me-kanisme pasar.

Menurut Lutfi, hal itu ditem-puh karena pemerintah sudah tidak mengatur tata niaga im-por kedelai sejak 2013. "Ma-kanya, yang bisa kami lakukan sekarang adalah memastikan suplai cukup dan memastikan semua saling berbagi beban. Importir memastikan bahan kedelai tetap ada, produsen me-mastikan barang (tahu-tempe) diproduksi, dan pemerintah in-formasikan ke pasar soal kena-ikan harga," ujarnya.

Butuh penengah

Secara terpisah, Ketua Ga-bungan Koperasi Produsen Ta-hu Tempe Indonesia (Gakop-tindo) Aip Syarifuddin menga-takan, harga tahu dan tempe saat ini berkembang sendiri se-suai mekanisme pasar. Semen-tara ini situasi kondusif dengan harga tahu-tempe di level Rp 15.000 per kg. Namun, jika ha-rga kedelai terus menguat sam-pai lima bulan ke depan, para

produsen tahu-tempe berharap pemerintah bisa menengahi.

"Kalau harga kedelai naik terus, harga tahu-tempe pasti juga begitu dan kasihan ma-syarakat yang sehari-hari mengonsumsi tahu-tempe. Ma-salah harga ini perlu dibahas dengan pemerintah supaya ti-dak parsial dan supaya patokan harganya sama dan merata," ka-ta Aip.

Kedelai lokal

Di sisi lain, ia berharap peme-rintah dapat menggenjot pro-duksi kedelai lokal. Sebab, In-donesia tidak bisa terus-mene-rus bergantung pada impor dan fluktuasi harga kedelai global. "Prinsipnya, bagi kami, yang penting kedelai selalu ada. Sela-ma ini, kedelai lokal belum cu-kup memadai. Makanya, ke de-pan perlu ditingkatkan pe-ngembangan kedelai lokal seca-ra profesional," ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021 di Istana Negara, Senin, mengingatkan, tata kelola sektor pertanian ha-rus diperbaiki. "Kedelai di Indonesia bisa tumbuh baik, ke-napa petani kita tidak mau ta-nani? Karena harganya kalah dengan kedelai impor. Kalau petani disuruh jual sama de-ngan harga kedelai impor, harga pokok produksi enggak *nutup*," tuturnya. K-10

Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk mengurangi impor adalah dengan meningkatkan daya saing dan produksi kedelai lokal. Pemerintah akan menyia-pkan lahan untuk memacu produksi kedelai dalam negeri.

Sejumlah petani, seperti di Malang dan Banyuwangi, eng-gan menanam kedelai karena harganya tak menjanjikan.

(ACE/NIA/WEL/GER)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Korporasi Petani Jadi Fokus Utama

Anggaran ketahanan pangan tahun ini naik 30 persen dari alokasi 2020.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION,
SAPTO ANDIKA CANDRA

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan fokus mengembangkan korporasi petani dan mekanisasi pertanian pada tahun ini. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pihaknya akan terus mengoptimalkan sumber daya pertanian untuk mendukung kemandirian pangan lokal dan nasional. Pemerintah pun menyiapkan anggaran senilai Rp 104 triliun untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut.

"Kementan telah tetapkan arah pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern sebagai pedoman untuk bertindak tegas, cepat, dan tepat serta dengan kinerja yang lebih maju," kata Syahrul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021 yang digelar virtual, Senin (11/1).

Menurut Syahrul, saat ini dibutuhkan memanfaatkan teknologi untuk dapat mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian. Selain itu, Syahrul menambahkan, peningkatan mekanisasi pertanian perlu didukung dengan adanya korporasi petani. Lewat korporasi, ia berharap pembangunan pertanian

akan lebih tertata sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat dari tahun ke tahun.

"Korporatisasi petani sementara dilakukan di enam provinsi dan semua provinsi lain akan terus dilakukan secara mandiri," kata Syahrul.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, anggaran ketahanan pangan naik 30 persen dari alokasi 2020 sebesar Rp 80 triliun menjadi Rp 104 triliun pada 2021. Ketahanan pangan tersebut mencakup sektor pertanian, perikanan, serta infrastruktur pendukung.

"Pada 2016 sampai 2020 anggaran ketahanan pangan trennya menurun. Namun, kami membuat pada 2021 itu meningkat lebih dari 30 persen," kata Suahasil.

Ia menjelaskan, terdapat tiga arah kebijakan utama pada tahun ini dalam sektor pangan. Pertama, mendorong produksi komoditas pangan dengan pembangunan sarana prasarana dan teknologi. Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional yang ditempuh lewat penguatan kelembagaan petani dan nelayan beserta distribusi pangan. Terakhir, yakni pengembangan *food estate* atau lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah, Su-

matra Utara, dan Papua.

Untuk peningkatan produksi pangan strategis, Suahasil mencontohkan, komoditas padi diharapkan bisa mencapai produksi 58,5 juta ton, jagung 24,2 juta ton, kedelai 420 ribu ton, serta daging sapi 440 ribu ton.

"Biasanya realisasi itu hanya sekitar 94 persen, tahun ini kalau bisa naik ke 96 persen atau 99 persen, bahkan kalau bisa sepenuhnya dipakai," kata Suahasil.

Kritik Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menyoroti besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah untuk subsidi pupuk pertanian sekitar Rp 33 triliun per tahun. Jokowi menilai, besarnya subsidi pupuk tidak sebanding dengan peningkatan produksi yang seharusnya terjadi.

"Rp 33 triliun setiap tahun. *Return*-nya apa? Kita beri pupuk itu kembalinya ke kita apa? Apakah produksi melompat naik? Saya tanya kembalinya apa?" ujar Jokowi.

Jokowi pun memberi hitungan sederhana. Apabila angka subsidi pupuk setiap tahun menyedot Rp 33 triliun, anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah selama 10 tahun untuk subsidi pupuk mencapai Rp 330 triliun. Angka ini, menurut Jokowi, terbilang sangat besar.

"Artinya tolong ini dievaluasi."

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Ini ada yang salah. Saya sudah berkali-kali meminta ini," kata Jokowi.

Menteri Pertanian telah menerbitkan Permentan 49/2020 terkait alokasi pupuk bersubsidi. Pada tahun ini, alokasinya naik menjadi 9,04 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan total alokasi subsidi pupuk 2020 sebesar 8,9 juta ton.

Menurutnya, produksi pertanian di Indonesia seharusnya sudah mulai menerapkan teknologi yang diperbarui dan manajemen pertanian yang mumpuni. Sehingga, menurut dia, angka produksi bisa meningkat dan harga komoditas lokal bisa bersaing dengan harga komoditas serupa yang diimpor. Cara ini, menurut presiden, bisa dijadikan solusi terhadap ketergantungan impor sejumlah komoditas pertanian.

"Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah. Ada yang *nggak* benar di situ," katanya.

Jokowi mengakui, terdapat pertumbuhan positif nilai ekspor sektor pertanian. Namun, ia menggarisbawahi, lonjakan ekspor itu lebih banyak disumbang oleh komoditas sawit.

"Ingat, ekspor kelihatan tinggi itu banyak berasal dari sawit. Bukan dari komoditas lain yang sudah kita suntik dari subsidi yang ada," kata Jokowi. ■ ed: ahmad fikri noor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Jokowi: Pertanian Skala Luas Solusi Kurangi Impor Pangan

Oleh **Novy Lumanauw** dan **Ridho Syukra** 10.7

► JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pembangunan sektor pertanian harus dilakukan dalam skala ekonomi yang luas, seperti halnya pembangunan kawasan lumbung pangan (*food estate*), agar bisa mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi demi meningkatkan produksi dan mengurangi impor pangan.

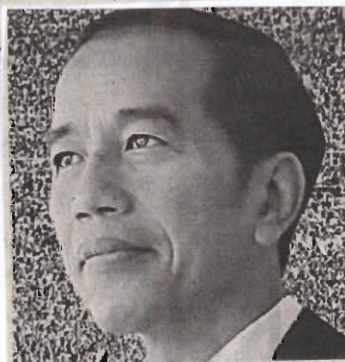
Saat ini, Indonesia masih aktif mengimpor pangan, seperti gula, kedelai, bawang putih, dan jagung, karenanya pengembangan komoditas tersebut tidak cukup hanya dengan 1-2 hektare (ha) atau 10 ha namun minimal harus 100 ribu ha, 300 ribu ha, 500 ribu ha, bahkan hingga 1 juta ha.

Demikian disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1). Jokowi menjelaskan, pembangunan pertanian tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional, rutinitas, dan monoton, melainkan harus menerapkan teknologi dengan skala ekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi lahan, keduanya merupakan jawaban untuk meningkatkan daya saing harga produk komoditas pangan lokal karena biaya produksi menjadi lebih murah. "Kita harus membangun sebuah kawasan yang *economic scale*, nggak bisa kecil-ke-

cil lagi. Oleh sebab itu, kenapa saya dorong *food estate* harus diselesaikan, paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara (Sumut) dan di Kalimantan Tengah (Kalteng) itu bisa diselesaikan," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, pengembangan *food estate* yang sedang dilakukan di Sumut dan Kalteng hendaknya dapat dijadikan contoh untuk daerah lainnya. Pengembangan kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di sekitar kawasan itu sekaligus menekan impor komoditas pangan yang selama ini dilakukan. "Kita mau evaluasi *food estate* ini, problemnya apa, masalah lapangannya apa, teknologinya yang kurang apa, dan juga dengan cara-cara teknologi, bukan cara-cara konvensional. *Food estate* ini akan menjadi contoh, kalau ini benar, bisa dijadikan contoh semua provinsi. Sudah, datang kopi saja, tapi memang dalam sebuah skala yang luas, *economic scale*," ujar Jokowi.

Lebih jauh Jokowi menuturkan, saat ini harga yang tidak kompetitif



Joko Widodo

antara komoditas pangan lokal dengan komoditas impor membuat para petani berhenti menanam komoditas pertanian, seperti kedelai, tebu, jagung, dan bawang putih. "Kalau harga tidak kompetitif, ya akan sulit kita bersaing. Sekali lagi, ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas. Cari lahan yang cocok untuk kedelai, tapi jangan hanya 1-2 ha, 10 ha, tapi 100 ribu ha, 300 ribu ha, 500 ribu ha, 1 juta ha. Lahan masih ada, cari. Percuma kita berproduksi *di-kit-dikit*, tidak akan *ngaruh* apa-apa

dengan yang impor-impor tadi. Jadi, kalau kita bisa siapkan lahan dalam jumlah besar itu yang akan menyelesaikan masalah," ujar Jokowi.

Jokowi secara khusus juga meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk serius membangun sektor pertanian sehingga impor pangan berkurang. Apalagi, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 33 triliun per tahun untuk subsidi pupuk dan bibit tanaman. "Kita tahu penduduk Indonesia sudah 270 juta

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

jiwa lebih. Karena itu, pengelolaan mpangan harus diseriisi, pembangunan pertanian harus betul-betul serius, terutama komoditas pertanian yang impor," kata Jokowi. Beberapa pekan terakhir misalnya, pemerintah disibukkan soal industri tahu-tempe yang produksinya terdampak kenaikan harga kedelai impor, ke depan hal itu hendaknya sudah terselesaikan. Pun dengan subsidi pupuk, kebijakan itu perlu dievaluasi. "Kalau tiap tahun kita mengeluarkan subsidi pupuk sebesar Rp 33 triliun, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada yang *nggak* benar di situ," katanya.

Di sisi lain, Jokowi tetap mengapresiasi sektor pertanian, dalam dua tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras. Selain itu, pada masa pandemi Covid-19 sektor tersebut juga menempati posisi yang semakin sentral. Namun demikian, hal tersebut harus tetap diwaspadai karena pandemi bisa mengganggu proses distribusi pangan. "Kita tahu Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati akibat pembatasan mobilitas warga dan bahkan distribusi barang antarnegara, distribusi pangan dunia menjadi terkendala," ungkap Jokowi.

Sejumlah Terobosan

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI berkenan hadir memberikan arahan dan membuka Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang bertema *Memperkuat Peran Sektor Pertanian Dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19* tersebut, hal itu menunjukkan perhatian yang tinggi Presiden Jokowi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) khususnya para petani. Dalam kesempatan itu, Mentan mengungkapkan, Kementan telah menetapkan arah kebijakan yaitu pertanian maju, mandiri, dan modern, sehingga arah kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam bertindak cerdas cepat dan tepat bagi seluruh jajaran Kementan.

Membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern kian tertantang kala Covid-19 masuk ke Indonesia dan menghantam perekonomian dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mencapai ketahanan pangan, nilai tambah, dan ekspor, yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas kemudian melakukan program pendukung yang telah diformat dengan 5 Cara Bertin-

dak (CB) sesuai arahan Presiden Jokowi. "CB yang kami lakukan meliputi peningkatan kapasitas dan produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan atau lumbung pangan, penerapan pertanian modern atau modernisasi pertanian, serta peningkatan ekspor pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks)," papar Mentan.

Mentan mengungkapkan, dalam menindaklanjuti arahan Presiden maka Kementan telah melakukan upaya terobosan melalui pengembangan *food estate* dan program korporasi pertanian di enam provinsi serta melakukan perluasan areal tanam. Menurut Mentan, dirinya beserta seluruh jajaran Kementan siap menjalankan tugas dan bekerja keras dil apangan dan menyampaikan terimakasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pembangunan pertanian. "Kami terus meminta arahan dan perintah dari Presiden RI untuk menjalankan tugas kami. Dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati, serta para menteri lainnya sangat luar biasa bagi kami," ujar Mentan. (tl)

Impor Tujuh Komoditas Strategis (Januari-November 2020)

Komoditas (Segar dan Olahan)	Volume (Kg)	Nilai (US\$)
Beras (gabah, beras ketan, dsb)	299.692.717	168.688.794
Gandum/Meslin	9.802.463.255	2.585.147.712
Jagung	1.130.639.052	281.141.853
Kedelai	6.786.829.678	2.656.485.629
Gula Tebu	5.382.268.876	1.870.264.008
Bawang Putih	467.295.653	462.171.690
Bawang Bombay	134.472.130	77.239.025

Sumber: BPS, Kementan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

Presiden Jokowi Dorong Peningkatan Produksi Pertanian Nasional

PRESIDEN Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Senin, (11/1). Dalam sambutannya kepada peserta dari seluruh stakeholder pertanian se-Indonesia, yang sebagian besar mengikuti secara virtual, Presiden menyampaikan dalam kondisi pandemi covid-19 sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral.

Presiden mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, kondisi pandemi yang mengakibatkan adanya pembatasan mobilitas warga, bahkan distribusi barang antarnegara serta distribusi pangan dunia.

Jokowi menegaskan bahwa untuk tetap dapat memenuhi pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia, maka pengelolaan yang berkaitan dengan pangan serta pembangunan pertanian harus dilakukan serius secara detail dan menggunakan skala luas. **M-3**

Menurutnya, upaya tersebut selain memperkuat ketahanan pangan nasional juga untuk mengurangi beban impor serta menjawab harapan banyak masyarakat terhadap kebutuhan pangan nasional.

"Carikan desain yang baik agar kita bisa selesaikan semua ini. Saya kira ini bisa

menjadi catatan untuk ke depannya. Memanfaatkan teknologi dan penyediaan lahan pertanian yang luas di seluruh provinsi. Kita tidak bisa melakukan cara yang lama yang sudah bertahun-tahun lalu. Kita butuh inovasi dan rutinitas yang tidak biasa," ujar Jokowi pada Rakernas tersebut.

"Dalam mengatasi masalah yang terjadi saat ini kita harus membangun program pertanian yang berbasis *economic of scale* (sekala ekonomi), untuk itu kenapa saya dorong *food estate* harus segera diselesaikan," imbuhnya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar di tahun ini program *food estate* yang telah digarap di Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera diselesaikan. Menurutnya, apabila program tersebut telah dilakukan, maka tahapan evaluasi penting dilakukan untuk melihat apa saja kendala yang terjadi di lapangan, sehingga nantinya apabila program tersebut berhasil dengan baik provinsi lain bisa mencontohnya.

"Inilah cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju yaitu melalui skala luas dan menggunakan teknologi pertanian, sehingga nantinya harga pokok produksi bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dengan negara lain. Oleh se-



BPMI SETPRES

bab itu, perlu membangun *economy scale* melalui *food estate*. saya ingin tahun ini sudah disemaikan agar bisa kita evaluasi bersama," tegasnya.

Perhatian semua pihak

Jokowi menilai pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Terlebih, kata Presiden, saat ini sektor pertanian menempati posisi yang sangat sentral karena terbukti mampu bertahan dari ancaman krisis.

Menurutnya, penduduk Indonesia sudah 273 juta lebih sehingga pengelolaan pangan betul-betul harus diserijsi. Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi yang bisa mendorong pertumbuhan pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri

Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden berkenan hadir memberikan arahan dan membuka acara Rakernas di Istana negara. Menurutnya, hal ini menunjukkan perhatian yang tinggi Presiden Jokowi kepada Kementerian, khususnya kepada para petani.

Di hadapan Jokowi dan beberapa menteri serta tamu undangan baik *offline* maupun *online* yang hadir dalam Rakernas bertema 'Memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah Pandemi Covid -19', Mentan menyampaikan beberapa hal terkait laporan pembangunan pertanian 2021. Yakni Kementan telah menetapkan arah kebijakan yaitu pertanian Maju Mandiri Modern, sehingga arah

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

kebijakan tersebut menjadi pedoman dalam bertindak cerdas cepat dan tepat bagi seluruh jajaran Kementan.

“Membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern kian tertantang kala wabah korona masuk ke Indonesia, dan menghantam perekonomian dunia termasuk Indonesia,” sebutnya.

Untuk itu, SYL membeberkan dalam rangka mencapai ketahanan pangan, nilai tambah dan ekspor yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas kemudian melakukan program pendukung yang telah diformat dengan 5 cara bertindak (CB) sesuai arahan.

Cara bertindak meliputi peningkatan kapasitas dan produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan atau lumbung pangan, penerapan pertanian modern atau modernisasi pertanian serta peningkatan ekspor pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

Lebih lanjut SYL mengung-

kapkan bahwa dalam menindaklanjuti arahan Presiden, Kementan telah melakukan upaya terobosan melalui pengembangan kawasan pertanian skala luas (*food estate*) dan program korporasi pertanian di 6 provinsi serta melakukan perluasan areal tanam. Ia beserta seluruh jajaran Kementan siap menjalankan tugas dan bekerja keras di lapangan.

“Kami terus meminta arahan dan perintah dari Presiden untuk menjalankan tugas kami. Dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah baik itu gubernur maupun bupati serta para Menteri yang lainnya sangat luar biasa bagi kami,” ujar Mentan.

Untuk itu, SYL menegaskan siap mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan produksi pangan nasional. Saat ini, jajaran Kementan sudah memiliki kebijakan jangka panjang yang bisa menekan angka impor. (S2-25)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

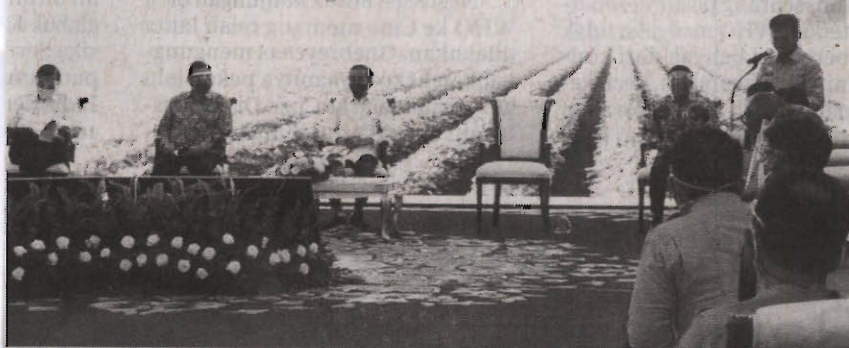
MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021
HALAMAN 3 /
RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Berita Foto
☐ Opini/Artikel
☐ Tajuk
☐ Pojok/Karikatur |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | |

Presiden Jokowi Dorong Peningkatan Produksi Pertanian Nasional

RAPAT KERJA NASIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2021

Istana Negara, 11 Januari 2021



Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Senin (11/1). Dalam sambutannya kepada peserta dari seluruh stakeholder pertanian se-Indonesia, yang sebagian besar mengikuti secara virtual, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral.

Presiden mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Apalagi, menurut dia, kondisi pandemi ini mengakibatkan adanya pembatasan mobilitas warga, bahkan distribusi barang antarnegara serta distribusi pangan dunia.

Presiden Jokowi pun menegaskan, untuk tetap dapat memenuhi pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia, pengelolaan yang berkaitan dengan pangan serta pembangunan pertanian harus dilakukan serius secara detail dan menggunakan skala luas. Dia mengatakan, upaya tersebut selain memperkuat ketahanan pangan nasional, juga untuk mengurangi beban impor serta menjawab harapan masyarakat terhadap kebutuhan pangan nasional.

"Carikan desain yang baik agar kita bisa menyelesaikan semua ini. Saya kira ini bisa

menjadi catatan untuk ke depannya. Memanfaatkan teknologi dan penyediaan lahan pertanian yang luas di seluruh provinsi. Kita tidak bisa melakukan cara yang lama, yang sudah bertahun-tahun lalu. Kita butuh inovasi dan rutinitas yang tidak biasa," ujar Jokowi di rakernas tersebut.

"Dalam mengatasi masalah yang terjadi saat ini, kita harus membangun program pertanian yang berbasis *economic of scale* (skala ekonomi). Untuk itu kenapa saya dorong *food estate* harus segera diselesaikan," katanya.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar pada 2021 ini program *food estate* yang telah digarap di Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera diselesaikan. Menurut dia, apabila program tersebut telah dilakukan, tahapan evaluasi penting dilakukan untuk melihat apa saja kendala yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, nantinya apabila program tersebut berhasil dengan baik, provinsi lain bisa mencontohkannya.

"Inilah cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju, yaitu melalui skala luas dan menggunakan teknologi pertanian. Sehingga nantinya, harga pokok produksi bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dengan negara lain. Oleh sebab itu, perlu membangun *economic scale* melalui *food estate*, saya ingin tahun ini sudah di-

semaikan agar bisa kita evaluasi bersama," katanya menegaskan.

Pertanian perhatian semua pihak

Jokowi menilai pembangunan pertanian harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Terlebih menurut Jokowi, saat ini sektor pertanian menempati posisi yang sangat sentral karena terbukti mampu bertahan dari ancaman krisis.

Dia mengatakan, penduduk Indonesia sudah 273 juta lebih sehingga pengelolaan pangan betul-betul harus diseriusi. Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan terobosan serta inovasi, yang bisa mendorong pertumbuhan pertanian berkelanjutan.

"Jika produktivitas kita meningkat, kita bisa mengurangi ketergantungan akan impor dan nanti *food estate* ini akan kita lakukan di provinsi lainnya dengan dana dari APBN. Saya turut menyampaikan apresiasi terkait adanya pertumbuhan positif di sektor pertanian, terutama pada peningkatan ekspor komoditas pertanian," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI, yang berkenan hadir memberikan arahan dan membuka acara rakernas di istana negara. Menurut dia, hal ini menunjukkan perhatian yang tinggi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pertanian, khususnya para petani.

Di hadapan Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri serta tamu undangan, baik *offline* maupun *online* yang hadir dalam rakernas, yang bertema "Memperkuat peran sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19", Mentan SYL menyampaikan beberapa hal terkait laporan Pembangunan Pertanian Tahun 2021. Kementan telah menetapkan arah kebijakan, yaitu pertanian Maju Mandiri Modern sehingga arah kebijakan tersebut, menjadi

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 3 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

pedoman dalam bertindak cerdas, cepat, dan tepat bagi seluruh jajaran Kementan.

"Membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern kian tertantang kala wabah korona masuk ke Indonesia, dan menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia," katanya.

Untuk itu, Mentan SYL membeberkan dalam rangka mencapai ketahanan pangan, nilai tambah dan ekspor yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas kemudian melakukan program pendukung, yang telah diformat dengan lima cara bertindak (CB) sesuai arahan Presiden Joko Widodo. CB meliputi peningkatan kapasitas dan produksi, diversifikasi pangan, penguatan cadangan atau lumbung pangan, penerapan pertanian modern atau modernisasi pertanian, serta peningkatan ekspor pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

Lebih lanjut Mentan SYL mengungkapkan, dalam menindaklanjuti arahan Presiden, Kementan telah melakukan upaya terobosan melalui pengembangan kawasan pertanian skala luas (*food estate*) dan program korporasi pertanian di enam provinsi, serta melakukan perluasan areal tanam. Ia beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian siap menjalankan tugas dan bekerja keras di lapangan.

"Kami terus meminta arahan dan perintah dari Presiden RI, untuk menjalankan tugas kami. Dukungan dan kerja sama dari pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati serta para menteri yang lainnya sangat luar biasa bagi kami," ujar Mentan SYL.

Untuk itu, Mentan SYL menyatakan kesiapannya untuk mengurangi ketergantungan impor, dengan meningkatkan produksi pangan nasional. Saat ini jajaran Kementan sudah memiliki kebijakan jangka panjang yang bisa menekan angka impor.

"Saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran Kementan untuk menjawab tantangan ini. Saya mau 200 hari dari sekarang, kita sudah bisa kasih jawaban ke Presiden," katanya.

Sebagai informasi, pada 2020 impor pangan berkurang sebesar 10 persen. Penurunan tersebut karena pemerintah memiliki program jangka panjang, yang fokus membangun sumber pangan di tiap-tiap daerah.

• ril

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

MENTAN KENA SEMPROT PRESIDEN Untungnya, Reshuffle Sudah Lewat

MESKI polemik melonjaknya harga kedelai sudah berlalu, Presiden Jokowi sepertinya masih jengkel. Kemarin, dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Jokowi meluapkan kejengkelannya itu. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, hadir dalam acara ini. Beruntung bagi Syahrul, dia disemprot Presiden di saat musim reshuffle sudah berlalu. (RM)

Dalam rapat tersebut, raut muka Jokowi datar. Tak banyak senyum. Kata-katanya tegas dengan intonasi kadang meninggi.

Jokowi mewanti-wanti agar kelangkaan kedelai, yang menjadi bahan baku tahu dan tempe, tidak terulang. Jokowi sepertinya merasakan betul, melonjaknya kedelai tetap

memukul para perajin tempe dan tahu, juga menyengsarakan rakyat.

Dia meminta Syahrul mengantisipasi persoalan ini secara serius. Caranya, dengan membangun sektor pertanian secara detail. Dia juga mengingatkan pernyataan Badan Pangan Dunia (FAO) terkait potensi terjadinya krisis pangan, selama pandemi. "Hati-hati mengenai ini. Hati-hati," pesan Jokowi, berulang-ulang.

Dengan penduduk Indonesia yang kini mencapai 270 juta jiwa lebih, lanjut Jokowi, sektor pangan harus dikelola serius dan detail. Terutama yang berkaitan dengan impor, seperti kedelai, jagung, gula, bawang putih, hingga beras. "Meskipun hampir 2 tahun kita nggak impor beras," cetus Kepala Negara.

Jokowi juga menyoroti program subsidi pupuk yang mencapai Rp 33 triliun. Dalam pandangannya, untuk

mengerek produktivitas pertanian, ketersediaan pupuk bukan satu-satunya cara. Negara perlu cara yang lebih hebat lagi. Misalnya sistem pertanian yang mumpuni. Di tengah perkembangan zaman, tak bisa lagi menggunakan teknik pertanian konvensional.

Jokowi mengingiikan ada terobosan dengan membangun kawasan pertanian yang *economic scale*, yakni areal tanam yang luas dan bersistem modern. Hal itu yang akan diwujudkan melalui pembangunan *food estate*. Cara-cara ini diyakininya bisa menekan biaya pokok produksi, dibarengi dengan hasil pertanian yang maksimal.

"Pembangunan pertanian yang harus kita tuju, skalanya luas dan teknologi dipakai betul. Sehingga harga pokok produksinya bisa bersaing dengan komoditas dari negara-negara lain," terangnya.

Mendengar Jokowi marah-marrah saat rapat pertanian, banyak warganet bersorak. Sebab, sebagian mereka juga jengkel dengan Menteri Syahrul. "Bapak kira yang kesal cuma njenengan? Petani juga pak," kata @Kholil_15.

Sebagian warganet langsung ngadu ke Jokowi soal kondisi pertanian di desanya.

Sedangkan akun @arrahan-99642797 menyebut Syahrul untung. Sebab, Syahrul kena semprot setelah reshuffle kabinet jilid I sudah berlalu. "Kalau belum, bisa kena juga kali ya. Hehehe," cuitnya.

Bagaimana tanggapan Syahrul? Dia siap melaksanakan tugas dan arahan Presiden dalam membangun pertanian maju, mandiri, dan modern. Menurutnya, program itu terus dikerjakan secara berkelanjutan. "Kami siap di lapangan Bapak. Tentu dengan arahan dan petunjuk Bapak," janji politikus Nasdem ini. ■ MEN

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 12/1/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 4 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☒ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika	☐ Fajar	☐ Pojok/Karikatur

TAJUK

Membangun Ketahanan Pangan

Seperti ayam mati di lumbung padi! Mungkin itu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan jika pemerintah dan seluruh *stakeholders* bangsa ini tidak segera membuat langkah-langkah terobosan membangun ketahanan pangan nasional.

Hampir semua jenis tanaman pangan bisa tumbuh subur di Indonesia. Namun, alih-alih mampu berswasembada pangan, Indonesia semakin keteteran memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri.

Pada Januari-November 2020 saja, impor bahan pangan utama mencapai US\$ 7,5 miliar, meliputi beras, gandum, jagung, kedelai, gula tebu, bawang putih, dan bawang bombai. Setiap tahun, Indonesia mengalami defisit pangan senilai miliaran dolar AS.

Bisa dipahami jika devisa kita banyak terkuras. Masuk akal pula jika nilai tukar rupiah sulit menguat terhadap mata uang lain, khususnya dolar AS. Juga dapat dimengerti bila perekonomian Indonesia terus digerogoti inflasi barang impor (*imported inflation*).

Karena tak bisa memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, Indonesia kerap mengalami gejolak harga dan kelangkaan pangan. Hampir setiap menjelang Lebaran, harga bahan pangan di dalam negeri melambung. Tak jarang pula terjadi kelangkaan.

Padahal, gejolak harga pangan sungguh berisiko. Harga pangan berkontribusi sekitar 50% terhadap laju inflasi dan 75% terhadap garis

kemiskinan. Gagal menstabilkan harga pangan berarti gagal mengendalikan inflasi.

Gagal mengendalikan inflasi berarti gagal menjaga daya beli masyarakat. Bila daya beli masyarakat terpuruk, penduduk hampir miskin akan jatuh miskin. Penduduk yang sudah miskin bakal semakin miskin. Ketika rakyat lapar, huru-hara mudah meletup.

Dampak gejolak harga dan kelangkaan bahan pangan selama pandemi Covid-19 jelas lebih berbahaya dibanding masa-masa normal. Itu sebabnya, pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap stok, pasokan, dan distribusi bahan pangan selama pandemi.

Kita bersyukur Presiden Jokowi masih gigih memperjuangkan terciptanya kedaulatan pangan nasional yang menjadi salah satu program unggulannya. Terobosan yang ditempuh Jokowi di antaranya membangun *food estate* atau lumbung pangan terpadu di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Presiden menargetkan proyek yang mulai dibangun pada 2020 itu terealisasi tahun ini.

Food estate berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, seluas 164,6 ribu ha. Pada tahap awal, proyek yang dikembangkan di bekas lahan gambut ini fokus pada tanaman padi. Selanjutnya *food estate* dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dikhususkan untuk komoditas hortikultura pada lahan seluas 30 ribu ha.

Proyek *food estate* yang dibangun di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara ditargetkan menjadi proyek percontohan

Jika banyak daerah membangun *food estate*, Indonesia bisa segera keluar dari ancaman krisis pangan, bahkan mampu berswasembada dan mengeksport bahan pangan. Bukan hanya selama pandemi, tapi untuk selamanya.

(*pilot project*) bagi daerah-daerah lainnya. *Food estate* dibangun secara terintegrasi dari hulu, antara, sampai hilir, menggunakan teknologi modern dengan memanfaatkan kecanggihan digital.

Produk pangan yang dihasilkan dari *food estate* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk diekspor. Proyek ini pun diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah tinggi bagi para petani melalui penguatan koperasi serta pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keputusan pemerintah membangun *food estate* sungguh tepat, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek-menengah, sektor pertanian semakin sentral. Itu karena mobilitas masyarakat dibatasi guna mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, distribusi barang di hampir semua negara terganggu akibat pandemi.

Karena alasan itu

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 12/1/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 4 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | ☐ Fajar | ☐ Pojok/Karikatur |

pula, Food and Agriculture Organization (FAO) wanti-wanti memperingatkan potensi krisis pangan di seluruh dunia selama pandemi. Apalagi semua tak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Dengan asumsi program vaksinasi yang berlangsung sampai tahun depan berhasil menangkal Covid, pembatasan mobilitas masyarakat bakal berlangsung sampai 2020.

Artinya, risiko krisis pangan mesti diwaspadai sampai tahun depan.

Tapi Indonesia tidak boleh hanya waspada selama pandemi. Ancaman krisis pangan akan selalu menghantui negeri ini jika pemerintah dan masyarakatnya terus bergantung pada pangan impor. Dalam konteks ini, pemerintah harus menjamin *food estate* di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dapat direalisasikan, nyata, dan terbukti mampu menjadi solusi untuk menghindarkan bangsa ini dari ancaman krisis pangan.

Paling penting, janji bahwa *food estate* bakal menjadi *pilot project* bagi daerah-daerah lainnya harus terus dikawal dan ditagih. Jika banyak daerah membangun proyek *food estate*, Indonesia bisa segera keluar dari ancaman krisis pangan, bahkan mampu berswasembada dan mengeksport bahan pangan. Bukan hanya selama pandemi, tapi untuk selamanya. □